



**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SIBOLGA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam
Konsentrasi Bidang Ilmu Ekonomi*

OLEH

NUR AZIZAH SITUMORANG

NIM : 13 230 0028

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I

H. Aswadi Lubis, SE.,M.Si
NIP. 19630107 199903 1 002

PEMBIMBING II

Utari Evy Cahyani, SP.,MM
NIP. 19870521 201503 2 004

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. Nur Azizah Situmorang
Lampiran : 6 (Enam) Eksamplar

Padangsidempuan, 16 November 2017
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Nur Azizah Situmorang yang berjudul: "**Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sibolga**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Ekonomi Syariah konsentrasi Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

H.Aswadi Lubis, SE.,M.Si
NIP. 19630107 199903 1 002

Pembimbing II

Utari Evy Cahyani, SP., MM
NIP 19870521 201503 2 004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nur Azizah Situmorang
NIM : 13 230 0028
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (ES-1. IE)
Judul Skripsi : Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sibolga.

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa Pasal 14 Ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 14 November 2017

Saya yang Menyatakan,



Nur Azizah Situmorang
NIM. 13 230 0028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Azizah Situmorang
Nim : 13 230 0028
Jurusan : Ekonomi Syariah (ES-1.IE)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sibolga"**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, 15 November 2017
Yang Menvatakan,



Nur Azizah Situmorang
NIM. 13 230 0028



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : NUR AZIZAH SITUMORANG
NIM : 13 230 0028
JUDUL SKRIPSI : PENGARU PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SIBOLGA.

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 197331128 200112 1 001

Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

Anggota

1. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 197331128 200112 1 001

2. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

3. Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

4. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Rabu/ 15 November 2017
Pukul : 09.00 s/d Selesai
Hasil/Nilai : 74,9 (B)
Predikat : AMAT BAIK
IPK : 3,32



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5SihitangPadangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH
TERHADAPA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KOTA SIBOLGA.**

**Nama : NUR AZIZAH SITUMORANG
NIM : 13 230 0028**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat-syarat
dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah
Konsentrasi Ilmu Ekonomi

Padangsidimpuan, 16 November 2017
Dekan

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Nur Azizah Situmorang
Nim : 13 230 0028
Judul : Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sibolga.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah dari hasil pembagian antara dana perimbangan pusat dan perimbangan daerah melalui hasil realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lainnya PAD yang sah. Pajak Daerah merupakan hasil dari pungutan daerah yang dipugut oleh daerah melalui pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Dilihat dari realisasi APBD Kota Sibolga bahwa tahun 1994 sampai dengan 2013 pajak daerah dan pendapatan asli daerah mengalami fluktuasi hampir setiap tahunnya. Fenomena ini tidak sesuai dengan teori yang mana bila pajak daerah meningkat maka pendapatan asli daerah juga meningkat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adakah Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sibolga tahun 1994-2013.

Penelitian ini merupakan analisis regresi linear sederhana dengan jenis penelitian kuantitatif dan pendekatan deskriptif, Penelitian yang dilakukan berdasarkan runtun waktu (*time series*). Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder, berupa data dokumentasi atau laporan yang telah tersedia dari hasil realisasi APBD Kota Sibolga dan dipublikasikan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau www.djpk.go.id dengan menggunakan perhitungan statistik melalui program computer yaitu SPSS versi 22.

Berdasarkan hasil yang diperoleh setelah data diolah, maka persamaan regresi sederhananya adalah $PAD = 1.896.293.902,704 + 4,006 \text{ pajak daerah} + 0,840$ yang artinya pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah hal tersebut ditunjukkan dengan perolehan R sebesar 0.747 dan R square 0,558 atau sebesar 55,8% yang mana bahwa variabel pajak daerah mampu menjelaskan variabel terikat sebesar 55,8 %. Sedangkan hasil dari uji t dapat disimpulkan bahwa karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,770 > 1,73406$), maka H_a diterima.

Kata Kunci: Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, atas berkat Rahmat dan Ridha-Nya peneliti dapat menyelesaikan menyusun skripsi ini. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan contoh suri teladan kepada seluruh umat manusia, sekaligus yang kita harapkan syafa'atnya di *yawmil mahsyar* kelak.

Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sibolga ”**, disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam jurusan Ekonomi Syariah konsentrasi Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Padangsidimpuan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat banyak mengalami kendala yang disebabkan keterbatasan penulis dalam berbagai hal. Namun demikian, berkat kerja keras, bantuan dan bimbingan serta doa dari semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Untuk itu, menghantarkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL Rektor IAIN Padangsidimpuan, serta Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga , Bapak H. Aswadi Lubis, S.E, M.Si wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Drs. H. Samsuddin Pulungan, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Rosnani Siregar, M.Ag wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku wakil dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Muhammad Isa, ST.,MM sebagai Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Ibu Delima Sari Lubis, MA sebagai Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, serta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.

4. Bapak H. Aswadi Lubis, S.E., M.Si sebagai pembimbing I dan Ibu Utari Evy Cahyani, S.E., MM sebagai pembimbing II, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Teristimewa kepada kedua orangtua, yaitu Ayahanda Jasmir Situmorang dan Almh. Ibunda Nurni Tanjung tercinta yang telah mengasuh dan membimbing, serta mendidik penulis semenjak dilahirkan hingga sampai sekarang, beliau berdua merupakan motivator penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada keluarga besar kakak dan adikku tersayang; Hotnida Elmi Situmorang, Titi Nurhayati Situmorang, S.Pd dan Basrah Jasmir Situmorang yang selalu memberikan dukungan, doa yang tulus, ketegaran menjalani cobaan, ketenangan dimasa-masa sulit dan tawa keceriaan yang selalu hadir ditengah-tengah keluarga.
8. Sahabat saya Sharul Romadhona, Imelda Lubis, Sri Rahayu Dalimunthe, Amkb, Anggun Ronauli Hutagaol, S.Pd dan Masri Sitompul Terima kasih atas Motivasi dan do'anya selama ini. yang selalu memberi semangat dan telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Buat teman-teman terdekatku seperjuangan jurusan Ekonomi Syariah dalam konsentrasi bidang Ilmu Ekonomi (ES-1.IE) angkatan 2013 yang selama proses pembelajaran selalu bersama dalam melewati masa-masa sulit dan bahagia. Serta teman-teman KKL angkatan 2013 Desa Muara Soro, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal. Teman-temanku alumni Asrama Putri IAIN PSP Utari, Rida, Nisa, Kiki, dan Sari. Terima kasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian sampaikan kepada penulis. Mudah-mudahan Allah Swt mempermudah segala urusan kita. Amin Ya Robbal 'alamin..
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga segala amalan yang baik tersebut akan memperoleh balasan rahmat dan karunia dari Allah SWT. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi

ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, peneliti berharap semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, November 2017
Peneliti

Nur Azizah Situmorang
13 230 0028

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es
ص	šad	š	es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	..’..	apostrof
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	a
— /	Kasrah	I	i
— و	ḍommah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﺍﻝ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, mau pun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL/SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
BERITA ACARA UJIAN <i>MUNAQASYAH</i>	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Definisi Operasional Variabel	6
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan Penelitian	8
G. Manfaat Penelitian	8
H. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Teori	11
1. Pajak	11
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	18
3. Pendapatan Penerimaan dalam Perspektif Islam	19
a. Kharaj	20
b. Ganimah	20
c. Ushur	20
d. jizyah	20
4. Pajak Daerah.....	22
B. Penelitian Terdahulu.....	25

C. Kerangka Pikir	26
D. Hipotesis	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
B. Jenis Penelitian	28
C. Populasi dan Sampel.....	29
1. Populasi	29
2. Sampel	29
D. Teknik Pengumpulan Data	30
E. Teknik Analisis Data	31
1. Statistik Deskriptif.....	31
2. Uji Normalitas	32
3. Uji Linieritas.....	32
4. Uji Regresi Linier Sederhana	33
5. Uji Hipotesis	33
a. Uji Hipotesis (Uji t).....	34
b. Uji Koefisien Determinan (R^2).....	34

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Sibolga	35
B. Deskripsi Data Penelitian	46
1. Pajak Daerah.....	46
2. Pendapatan Asli Daerah.....	47
C. Hasil Analisis Data	48
1. Analisa Statistik Deskriptif.....	48
2. Uji Normalitas	49
3. Uji Linieritas.....	50
4. Uji Regresi Linier Sederhana	51
5. Uji Koefisien Determinan (R^2).....	53
6. Uji Hipotesis (Uji t)	53
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	55

E. Keterbatasan Penelitian	57
----------------------------------	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
---------------------	----

B. Saran	60
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman awal kemerdekaan Republik Indonesia Kota Sibolga menjadi ibukota Keresidenan Tapanuli di bawah pimpinan seorang Residen dan membawahi beberapa “Luka atau Bupati”. Pada zaman revolusi fisik Sibolga juga menjadi tempat kedudukan Gubernur Militer Wilayah Tapanuli dan Sumatera Timur Bagian Selatan, kemudian dengan dikeluarkannya surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 102 Tanggal 17 Mei 1946, Sibolga menjadi Daerah Otonom tingkat “D” yang luas wilayahnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Residen Tapanuli Nomor: 999 tanggal 19 November 1946 yaitu Daerah Kota Sibolga yang sekarang. Sedang desa-desa sekitarnya yang sebelumnya masuk wilayah Sibolga On Omne Landen menjadi atau masuk Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.¹

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Sibolga ditetapkan menjadi Daerah Swatantra Tingkat II dengan nama Kotapraja Sibolga yang dipimpin oleh seorang Walikota dan daerah wilayahnya sama dengan Surat Keputusan Residen Tapanuli Nomor: 999 tanggal 19 November 1946. Selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor: 18 tahun 1956 Daerah Swatantra Tingkat II Kotapraja Sibolga diganti sebutannya menjadi Daerah Tingkat II Kota Sibolga yang pengaturannya selanjutnya ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan

¹ [Http://www.SibolgaKota.go.id](http://www.SibolgaKota.go.id).

Daerah yang dipimpin oleh Walikota sebagai Kepala Daerah. Kemudian hingga sekarang Sibolga merupakan Daerah Otonom Tingkat II yang dipimpin oleh Walikota Kepala Daerah.

Kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 1979 tentang pola dasar Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Sibolga ditetapkan Pusat Pembangunan Wilayah I Pantai Barat Sumatera Utara. Perkembangan terakhir yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Daerah Nomor: 4 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi Kantor Kecamatan, Sibolga dibagi menjadi 4 (empat) Kecamatan, yaitu: Kecamatan Sibolga Utara, Kecamatan Sibolga Kota, Kecamatan Sibolga Selatan, dan Kecamatan Sibolga Sambas.

Kota Sibolga sebagai Pembagian kekuasaan dengan asas desentralisasi (penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia), maka tujuan dari Otonomi daerah itu sendiri menciptakan kehidupan politik yang lebih demokratis, menciptakan sistem yang lebih menjamin pemerataan dan keadilan, memungkinkan setiap daerah menggali potensi natural dan kultural yang dimiliki.² Namun hal demikian baru bisa dicapai melalui perekonomian yang baik, teratur dan terencana. Untuk mencapai keadaan demikian itu harus dilakukan peningkatan keadaan ekonomi dan peningkatan moral rakyatnya

²Indra Bastian, *Akutansi Sektor Publik: Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2006), hlm. 338.

melalui suatu pembangunan, karena dasar pembangunan yang baik ialah pembangunan terencana.

Biasanya Pembangunan Terencana hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat sumber pendapatan atau dana yang tersedia. Biasanya pendapatan tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik dalam maupun luar negeri dan itu berupa dari sektor swasta maupun sektor pemerintahan.³

Pendapatan penerimaan pemerintah adalah Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Umumnya penerimaan pemerintah dapat dibedakan antara penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak, misalnya adalah penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman pemerintah baik pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri, penerimaan dari badan usaha milik pemerintah, penerimaan dari lelang, dan sebagainya.⁴

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 bahwa Daerah berwenang

³Guritno Mangkoesobroto, *Ekonomi Publik* (Yogyakarta: BPFE, 1993), hlm. 181.

⁴*Ibid.*

untuk mengatur lebih besar terhadap urusan rumah tangganya, dan lebih bijak dalam memberdayakan segala potensi perekonomian daerahnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terhadap laju pertumbuhan dan pendapatan perkapita di provinsi Sumatra Utara tahun 2013 (*Sumber, BPS Sumut 2014*) dengan 25 kabupaten dan 8 kota yang dimana mengelompokkan daerah maju, daerah tertekan, daerah berkembang dan daerah terbelakang (menurut Tipologi Klassen) diketahui ada 3 Kota yang masuk kepada daerah terbelakang yaitu: Kota Sibolga (30,587 %), Kota Tanjung Balai (32,035%), dan Kota Pematang Siantar (71,612%) berdasarkan tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bisa kita lihat bahwa kota Sibolga adalah kota Daerah Terbelakang dan termasuk ke dalam urutan terbawah dari Kota Pematang Siantar dan Kota Tanjung Balai.⁵

Kota Sibolga sebagai daerah otonom yang mengatur sendiri rumah tangganya belum mampu menjadikan daerahnya sebagai daerah maju sedangkan kita ketahui bahwa Kota Sibolga adalah Kota berlambangkan Perikanan artinya Kota Sibolga itu sendiri memiliki potensi sumber kekayaan dari sektor Perikanan. Namun, dari pada itu Kota Sibolga juga terkenal akan Pariwisata, Jasa, Perdagangan dan Industri maritim. Kota yang memiliki potensi sumber daya alam yang mendukung untuk perkembangan dari wilayahnya dibandingkan di daerah lain.

Sebagaimana selama ini Kota Sibolga adalah kawasan Objek Wisata yang diminati dari berbagai daerah sebagai tujuan liburan keluarga. Namun,

⁵<https://sumut.bps.go.id>

sebagai Daerah Otonom Kota Sibolga memiliki Penerimaan Pendapatan yang selalu berfluktuasi dapat kita lihat dari tabel 1 bahwa pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kota Sibolga cenderung mengalami fluktuasi di setiap tahunnya.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah, Kota Sibolga
tahun 1994-2013 (Rupiah)

No.	TAHUN	PAD	PAJAK DAERAH
1	1994	1.031.060.797	228.866.430
2	1995	1.134.260.710	274.087.190
3	1996	1.352.095.154	304.294.933
4	1997	1.388.039.395	305.612.281
5	1998	5.203.581.900	1.495.698.600
6	1999	1.329.176.251	401.471.432
7	2000	1.348.083.000	340.080.000
8	2001	2.463.310.000	594.560.000
9	2002	4.257.490.000	973.500.000
10	2003	7.162.160.000	1.375.330.000
11	2004	7.972.800.000	4.212.050.000
12	2005	5.467.170.000	1.586.270.000
13	2006	7.831.430.000	1.298.680.000
14	2007	9.412.177.948	1.858.656.953
15	2008	11.677.675.253	2.184.216.023
16	2009	12.820.153.408	2.389.258.589
17	2010	15.118.409.482	2.662.000.000
18	2011	21.663.389.950	4.748.000.000
19	2012	28.359.549.182	1.183.138.654

20	2013	29.458.000.000	6.162.000.000
----	------	----------------	---------------

Sumber : www.djpk.depkeu.go.id

Dari tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Sibolga mengalami Fluktuasi dari tahun ke tahun. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap anggaran pendapatan dan belanja daerah telah ditentukan di setiap tahun dan dirancang melalui Dana Perimbangan oleh Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD). Namun, Kota Sibolga belum dapat berkembang melalui Pendapatan Asli Daerahnya dan melakukan pembangunan di wilayahnya. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti judul “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sibolga”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, yang akan menjadi identifikasi masalahnya adalah:

1. Penyebab Terbelakangnya daerah Kota sibolga.
2. Rendahnya Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sibolga.
3. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah Kota Sibolga.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti memberikan batasan masalah yang akan diteliti yaitu mengenai pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi diukur dengan pendapatan asli daerah Kota Sibolga.

D. Definisi Operasional variabel

Variabel di dalam penelitian merupakan suatu atribut dari sekelompok objek yang diteliti yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lain dalam kelompok tersebut.⁶ Untuk menyatakan definisi operasional variabel tidak boleh mempunyai makna yang berbeda dengan definisi konseptual variabel. Oleh karena itu, sebelum menyusun definisi operasional variabel, peneliti harus membuat definisi konseptual variabel penelitian terlebih dahulu.⁷

Adapun variabel yang akan digunakan yaitu variabel independen dan variabel dependen. Dengan variabel independennya menggunakan satu variabel (X) yaitu variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhnya variabel dependen. Sedangkan variabel dependennya (Y) yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen.

Tabel 1.2
Definisi Operasional Variabel

Variable	Definisi	Indikator	Skala
Pajak Daerah (X)	Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan imbalan secara	1. Pajak Kabupaten/Kota a. Pajak Hotel b. Pajak Restoran c. Pajak Hiburan d. Pajak Reklame e. Pajak Parkir f. Pajak Penerangan jalan g. Pajak Lain-lain.	Rasio

⁶Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT.RajaGrafindoPersada, 2004), hlm. 47 .

⁷Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta:Kencana, 2011), hlm. 97.

	langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.		
Pendapatan Asli daerah (Y)	PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 	Rasio

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu adakah Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sibolga?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sibolga.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini:

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis, melengkapi tugas dan syarat dalam rangka penyelesaian studi untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE).

2. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk mengambil kebijakan dalam mengawasi Pendapatan Asli Daerah dan pertimbangan untuk perencanaan pembangunan ekonomi di Kota Sibolga.

3. Bagi IAIN Padangsidimpuan

Hasil penelitian ini sebagai masukan bahan referensi bagi mahasiswa atau pihak manapun yang berminat dalam melakukan penelitian ini.

4. Bahan perbandingan kepada peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini bisa jadi sebagai perbandingan yang memiliki keinginan untuk membahas hal yang bersangkutan dengan topik yang sama.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, definisi operasional variabel, rumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat penelitian.

2. Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi kerangka teori, penelitian terdahulu, kerangka pikir, dan hipotesis.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan berisi mengenai hasil penelitian mengenai pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

5. Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kerangka Teori

a) Penerimaan Daerah

Penerimaan atau pendapatan Daerah adalah sumber untuk membiayai penyelenggaraan kehidupan suatu daerah. Kemampuan daerah untuk membiayai dirinya sendiri sangat ditentukan oleh sumber penerimaan Daerah ini.¹

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan Pendapatan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah dan di ambil dari pajak-pajak yang dipungut oleh daerah dan di akui sebagai Pendapatan Asli Daerah melalui hasil pembagian dari dana perimbangan pusat dan perimbangan daerah melalui hasil realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) adalah gambaran terhadap kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam memperoleh pendapatan dan pengeluaran untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pada umumnya penerimaan pemerintah dapat dibedakan antara penerima pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan

¹Henry Faizal Noor, *Ekonomi Publik* (Padang: Akademia Permata, 2013), hlm 131.

bukan pajak, misalnya adalah penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman luar negeri, penerimaan dari badan usaha milik pemerintah, penerimaan dari lelang, dan sebagainya.²

Penerimaan pemerintah lainnya adalah pajak. Definisi pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogative pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya. Sebagai contoh, pajak penghasilan. Pajak penghasilan yang diterima pemerintah tidak akan dapat ditunjukkan penggunaannya, akan dipakai untuk apa, apakah untuk membayar upah dan gaji pegawai negeri, untuk membeli barang/jasa, atau untuk membayar utang pemerintah. Sebaliknya, pungutan pemerintah karena pembayar menerima jasa tertentu dari pemerintah disebut dengan retribusi, misalnya saja pungutan parkir, pembayaran listrik, pembayaran air minum, dan sebagainya.

Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 salah satu sumber pendapatan daerah adalah PAD yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lainnya PAD yang sah.³

²Guritno Mangkoesobroto, *Ekonomi Publik* (Yogyakarta: BPFE, 1993), hlm. 181.

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.

2) Pendapatan Dalam Perspektif Islam

Pada masa-masa awal pemerintahan Islam di Madinah (623M) atau tahun 1 Hijriah, pendapatan dan peneluaran Negara hamper tidak ada. Rasulullah sendiri adalah seorang kepala Negara, pemimpin di bidang hukum, pemimpin dan penanggung jawab dari keseluruhan administrasi. Rasulullah tidak mendapat gaji sedikit pun dari Negara atau masyarakat, kecuali hadiah kecil yang umumnya berupa bahan makanan. Pada fase awal ini, Hampir seluruh pekerjaan yang dilakukan tidak mendapat upah.

Sumber pendapatan dan penerimaan pada masa Rasulullah Saw dan Khulafaur Rasyidin adalah pajak. Pajak itu sendiri dikenal dengan nama *zakat*, dan diperkenalkan pada tahun ke 8 Hijriah di awal-awal masa pemerintahan Islam dengan zakat dikumpulkan dalam bentuk uang tunai, hasil peternakan, dan hasil pertanian.⁴

Hasil Pendapatan pemerintah Islam itu sendiri bersumber dari pajak yang kemudian Struktur Pendapatan itu sendiri terdiri dari:

(1). Kharaj

Dalam penjelasan perincinya, *Ash-Shawafi* ini sebenarnya adalah harta tanah takhlukkan dan ditetapkan oleh

⁴Adiwarman Karim, *Op.,cit*, hlm. 240.

baitul mal. Tanah yang dimaksud adalah tanah yang tidak ada pemiliknya, tanahnya para raja, tanahnya para panglima perang, tanahnya pemilik yang lari dalam perang.

Dalam pendefenisian umumnya sering disebut *kharaj*. Istilah ini dipopulerkan oleh khalifah Umar bin Khattab pada masa Umar bin Khattab pengurus *kharaj* mulai diatur secara sistematis dan ditertipkan dengan mendirikan *diwan Al-Kharaj* hal ini sebabkan karna banyaknya daerah yang berhasil di takhlukkan termasuk tanah pertanian. Umar memperlakukan tanah tersebut sebagai *Fa'I Kharaj*, pada masa itu banyak terdapat didaerah bekas kerajaan Romawi dan Sasanit.

(2). Ganimah

Ganimah merupakan pendapatan Negara yang di dapat dari kemenangan perang. Penggunaan uang yang berasal dari ganimah ini ada ketentuannya dalam Al-Qur'an. Distribusi Qanimah empat perlimanya diberikan pada para prajurit yang bertempur, sementara seperlimanya adalah khums (harta rampasan perang).

(3). Ushur

Ushur ini merupakan salah satu sumber pendapatan Negara. Pada awalnya ushur merupakan pajak perdagangan

yang dikenakan kepada pedagang nonmuslim yang melakukan perdagangan di Negara Islam.

(4). Jizyah

Secara bahasa jizyah berasal dari kalimat jaza yang berarti penggantian (kompensasi), atau balasan atas suatu kebaikan atau kejahatan. Secara terminologi jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada warga nonmuslim sebagai imbalan untuk jaminan kehidupan yang diberikan oleh Negara Islam. Jizyah dipungut oleh Negara dari warga nonmuslim yang membuat perjanjian dengan pemerintah sebagai wujud loyalitas mereka kepada pemerintahan Islam, konsekuensi dari perlindungan, jaminan keamanan jiwa dan harta, fasilitas ekonomi, social yang diberikan pemerintah islam kepada mereka, dan sebagai kompensasi dibebaskan dari kewajiban ikut perang.

Menurut Nabhani, jizyah merupakan hak yang diberikan Allah Swt kepada kaum muslimin dari orang kafir, karena adanya ketundukan mereka kepada pemerintahan Islam. Jizyah tersebut merupakan harta umum yang dibagikan untuk kemaslahatan rakyat dan wajib diambil setelah melewati satu tahun. Dalil yang digunakan dalam menetapkan jizyah ini terdapat dalam Surah At-Taubah [9]:29. Namun, menurut pandangan Islam, pada Al-Quran

hanya satu kali saja kata pajak yaitu jizyah yang ada dalam terjemahan Al-Quran Surah At-Taubah [9]:29.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا
 بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
 وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ
 أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
 صَاغِرُونَ

Artinya: perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah (pajak (Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka)) dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk).⁵

Berdasarkan ayat diatas setiap manusia hendaklah melaksanakan kewajibannya sebagai makhluk ciptaan Allah Swt. Dengan membayar pajak yang telah di pungut oleh pemerintah Islam demi kelangsungan hidup bermasyarakat yang tentram, aman dan makmur.

⁵Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 27.

(5). Zakat

Di awal-awal pemerintahan Islam, zakat dikumpulkan dalam bentuk uang tunai, hasil peternakan, dan hasil pertanian. Zakat itu sendiri dalam rukun Islam Ketiga, diwajibkan di madinah pada tahun kedua hijriyah. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa pemerintah ini diwajibkan bersamaan dengan perintah kewajiban shalat ketika Nabi Swt. Kepada setiap Ulil Amri.

Zakat menurut bahasa artinya adalah berkembang (an-nama) atau “pensucian” (at-tathhir). Adapun menurut syara, zakat adalah hak yang telah ditentukan besarnya yang wajib dikeluarkan pada harta-harta tertentu.

(6). Infaq

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti meneluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Termaksud dalam pengertian ini, infaq yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya(lihat QS Al-Anfal 8: 36). Sedangkan menurut istilah, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk satu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, infaq tidak mengenal hisab. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang

beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah.

3) Pajak Daerah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶

Awalnya, Pajak berupa pungutan wajib, tepatnya iuran wajib dari rakyat bagi raja atau penguasa. Iuran ini merupakan bentuk ketaatan rakyat pada penguasa. Jadi, Pajak bersifat subordinatif (memiliki kedudukan tidak sederajat atau setara). Selanjutnya, uang pajak digunakan raja dan keluarganya untuk membiayai kehidupan sehari-harinya. Di samping membayar tentara yang akan menjaga keamanan Negara. Pada masa itu, pajak benar-benar menjadi hak penguasa (Raja).⁷

Di Indonesia sendiri, pajak dalam terminologi modern diwarisi dari praktik kolonial, dalam persinggungannya dengan kerajaan dan sistem feodal (struktur pendelegasian kekuasaan sosio politik yang dijalankan kalangan bangsawan). Tidak ada istilah keadilan karena corak pemungutan adalah untuk

⁶Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007.

⁷Dwiarso Utomo, Yulita Setiawan, dan Agung Yulianto, *Perpajakan* (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET; Semarang: UDINUS, 2011), hlm.2.

kepentingan penguasa. Akibatnya, pajak tak ubahnya seperti alat penghisapan.⁸

Menurut, Rochmat Soemitro Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁹

Pajak sebagai sumber penerimaan Negara lebih tepatnya aset Negara yang digunakan untuk kelangsungan pembangunan yang merata bagi setiap daerah dan juga sebagai pembiayaan pengeluaran pemerintah. Sebagai kontribusi wajib, iuran yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah akan mempercepat pembangunan di suatu negara.

Namun, bila banyaknya penunggakan iuran masyarakat kepada pemerintah maka akan terhambatnya pembangunan di suatu Negara. Karenanya besarnya pajak yang diterima pemerintah dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, sebaliknya pajak dapat memengaruhi pola laku produksi dan atau konsumsi.¹⁰

⁸Yustinus Prastowo, *Panduan Lengkap Pajak* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), hlm. 6-7.

⁹Prathama Rahardja, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)* (Jakarta: Lemabaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas, 2008), hlm. 445.

¹⁰Yustinus Prastowo, *Panduan Lengkap Pajak* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), hlm. 6-7

Lain hal nya pajak dalam pandangan Islam yang mana pajak dikenal dengan kata zakat. Zakat itu sendiri memiliki implikasi dan andil yang menentukan pada kebangkitan peradaban Islam dalam arti yang luas. Implikasi zakat dalam perekonomian, yaitu: *pertama*, zakat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan. *Kedua*, zakat memperkecil jurang kesenjangan ekonomi. *Ketiga*, zakat dapat menekan jumlah permasalahan sosial, kriminalitas, pelacuran, gelandangan, pengemis dan lain-lain. *Keempat*, zakat dapat menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha.¹¹

Ada empat pendapat yang berbeda tentang bagaimana hubungan zakat dan pajak, yaitu:

- a. *Zakat dan pajak adalah dua kewajiban sekaligus terhadap agama dan Negara.* Pendapat ini dikemukakan antara lain oleh Dr. Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *fiqh Az-Zakah*. Qardhawi memandang bahwa zakat dan pajak adalah dua kewajiban yang sama-sama wajib atas diri kaum muslim. Hanya saja pajak diberlakukan untuk kondisi tertentu.
- b. *Zakat adalah kewajiban terhadap agama, dan pajak adalah kewajiban terhadap Negara.*

¹¹Nurul Huda , *Keuangan Publik Islam pendekatan teoritis dan sejarah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 91 .

- c. *Zakat adalah roh dan pajak adalah badannya. Roh dan badan tak mungkin dipisahkan.* Pendapat ini dikemukakan antara lain oleh Drs. Masdar F. Mas'udi, dalam bukunya *Reinterpretasi pendayagunaan ZIS, Menuju Efektivitas pemanfaatan Zakat, Infaq, Sedekah, dan buku lainnya agama keadilan, Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam, yang menyebutkan bahwa 'pajak itulah zakat'*. Artinya, jika seseorang sudah membayar pajak, berarti ia sudah membayar zakat. Menurut Masdar, zakat adalah landasan teorinya, sedangkan praktik sebenarnya adalah pajak.
- d. *Pajak tidak wajib bahkan haram.* Pendapat ini dikemukakan antara lain oleh Dr. Hasan Turabi dari Sudan dalam bukunya *Principle of Governance, Freedom, and Responsibility in Islam*. Pendapat ini dilandasi oleh kekhawatiran ulama, jika pajak dibolehkan maka akan dapat menjadi alat penindas rakyat oleh penguasa.¹²

¹²*Ibid,*

a) Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena fungsinya. Secara umum, pajak memiliki 4 fungsi, yaitu:

(1).Fungsi Anggaran (Budgetair)

Fungsi anggaran merupakan fungsi pembiayaan untuk pembangunan dan penyelenggaraan Negara. Biasanya, penerimaan pajak sebagai pelaksanaan fungsi anggaran tercermin dalam APBN.

(2).Fungsi Mengatur (Regulerend)

Selain mengemban fungsi penerimaan Negara, pajak juga berfungsi sebagai alat kebijakan ekonomi politik yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi atau tingkat konsumsi masyarakat. Sebagai contoh, untuk melindungi produksi dalam negeri, Negara dapat menerapkan tarif bea masuk: agar daya beli rakyat berpenghasilan rendah terjaga, Negara dapat memberikan fasilitas berupa pajak ditanggung pemerintah: dan sebagainya.

Pajak dengan berbagai fasilitas dan keringanan yang ditawarkan juga menjadi sarana efektif untuk menjaga stabilitas dan menjadi alat redistribusi pendapatan yang baik. Sistem pemungutan pajak yang baik, aturan perpajakan yang adil, dan dukungan aparaturnya yang

profesional adalah pilar agar pajak sebagai alat redistribusi pendapatan dapat berdaya guna. Pajak yang dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik merupakan sarana menuju kebaikan dan kesejahteraan bersama.¹³

b) Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak terdiri dari:

(1).Menurut golongan:

(a).Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya : pajak penghasilan

(b).Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya : pajak pertambahan nilai

(2).Menurut sifatnya:

(1).Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

Contohnya : pajak penghasilan

(2). Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objek tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib pajak.

¹³Mardiasmo, *Perpajakan* (yogyakarta: Andi, 2011), hlm. 1.

Contohnya : Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

(3). Menurut lembaga pemungutannya:

(1). Pajak pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contohnya: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan dan bea materai.

(2). Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri dari :

(a). Pajak Propinsi, contoh; pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

(b). Pajak kabupaten/kota, contoh; pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan.¹⁴

¹⁴Mardiasmo, *Op.Cit.*, hlm. 5-6.

c) **Tata Cara Pemungutan Pajak**

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

a) Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak berdasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realitas. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan diketahui).

b) Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah Di samping Retribusi Daerah. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.¹⁵

Pendapat lain diajukan oleh Soemohamidjojo, sebagai berikut:

Pajak ialah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang, jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

¹⁵Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000). hlm. 143.

Dari pendapat tersebut di atas terlihat bahwa ciri mendasar pajak adalah:

1. Pajak dipungut oleh Negara berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hokum lainnya.
2. Pajak dipungut tanpa adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditujuk
3. Hasil pungutan pajak digunakan untuk menutup pengeluaran Negara dan sisanya apabila masih ada digunakan untuk investasi
4. Pajak disamping sebagai sumber keuangan Negara (budgetair), juga berfungsi sebagai pengatur (regulair).

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak Negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang digunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.¹⁶

Menurut Undang- Undang Nomor 34 tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang No.18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan

¹⁶*Ibid*, hlm. 144.

otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah kabupaten/kota.¹⁷

Pajak Daerah Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- 1) Pajak Provinsi terdiri atas:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d) Pajak Air Permukaan; dan
 - e) Pajak Rokok.

- 2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a) Pajak Hotel;
 - b) Pajak Restoran;
 - c) Pajak Hiburan;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) Pajak Penerangan Jalan;
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g) Pajak Parkir;
 - h) Pajak Air Tanah;
 - i) Pajak Sarang Burung Walet;
 - j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.¹⁸

¹⁷Mardiasmo, *Op.Cit.*, hlm. 12.

¹⁸Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta:Rajawali Pers,2011). hlm. 3.

2. Penelitian Terdahulu

Asas tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bangunan keilmuan yang sudah diletakkan oleh orang lain sehingga penelitian yang akan dilakukan benar-benar baru dan belum pernah diteliti sebelumnya dan dengan kata lain dengan menelaah peneliti terdahulu seseorang akan mudah menelokalisasi kontribusi yang akan di buatnya. Suatu permasalahan yang muncul biasa karena sulit ditemukannya penelitian yang sejenis, kemudian peneliti baru menyatakan bahwa penelitiannya benar-benar baru dan belum tersentuh orang lain. berikut ini adalah penelitian yang bersangkutan dengan permasalahan latar belakang diatas:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama penelitian	Judul penelitian	Hasil penelitian
1	Julick Ferlis Difu Jorie. M. Ruru Alden Laloma (Jurnal)	Pengaruh Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Bahwa pajak daerah belum bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Halmahera
2	Rina Rahmawati Ruswandi (Skripsi,2009)	Analisis Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten sumedang	Pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap nilai PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kabupaten Sumedang dengan elastisitas sebesar 0,193, yang berarti bahwa jika pajak daerah meningkat sebesar satu persen, maka nilai total penerimaan PAD akan meningkat

			sebesar 0,193 persen (<i>ceteris paribus</i>).
--	--	--	---

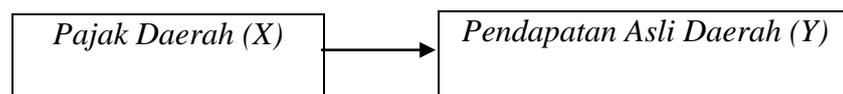
Persamaan penelitian Julick Ferlis Difu, Jorie. M. Ruru dan Alden Laloma dengan penulis ialah sama-sama menganalisis penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah dengan alat analisis yang digunakan juga sama yaitu dengan menggunakan Analisis Statistik Deskriptif. Sedangkan perbedaannya dengan penulis adalah daerah dan tahun yang diteliti penulis. Penulis meneliti di Kota Sibolga tahun 1994-2013. Sedangkan Julick Ferlis Difu, Jorie. M. Ruru dan Alden Laloma melakukan penelitian di kabupaten Halmahera tahun 2010-2012.

Persamaan penelitian Rina Rahmawati Ruswandi dengan penulis ialah sama melihat pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan perbedaannya dengan penulis adalah daerah, tahun dan alat yang diteliti penulis. Penulis meneliti di Kota Sibolga tahun 1994-2013 dengan alat analisis statistik deskriptif. Sedangkan Rina Rahmawati Ruswandi meneliti di kabupaten sumedang tahun 1994-2008 dengan alat analisis deskriptif dan metode regresi komponen utama (*Principal Component Regression*).

3. Kerangka Pikir

Berdasarkan teori tersebut, peneliti tertarik untuk melihat pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi terhadap pendapatan asli daerah di Kota Sibolga yang tertuang dalam kerangka pikir penelitian ini yang digambarkan pada gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



Kerangka pikir diatas menjelaskan bagaimana kedua variabel dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini variabel bebas yaitu (X) adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain yaitu pajak Daerah. Sedangkan variabel terikat (Y) adalah variabel yang dipengaruhi variabel bebas dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi.¹⁹ Hipotesis yang dilakukan penulis merupakan gambaran dugaan sementara tentang adakah hubungan pajak daerah dan pendapatan asli daerah.

Ho = Penerimaan Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sibolga.

¹⁹Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 47 .

Ha = Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli
Daerah Kota Sibolga.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan data Kota Sibolga atau www.djpk.go.id dengan rentan waktu penelitian Januari sampai dengan April 2017, yang dimulai dari penyusunan rencana dan penelitian hingga akhir penyelesaian penelitian yang dibuat oleh peneliti.

B. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan atau pengaruh yang terukur, meramalkan dan mengontrol.¹

Penelitian kuantitatif dimulai dengan kegiatan menjajaki permasalahan yang akan menjadi pusat perhatian peneliti. Kemudian peneliti mendefinisikan serta memformulasikan masalah penelitian dengan jelas sehingga mudah dimengerti.²

Penelitian yang dilakukan penulis atas berdasarkan runtun waktu atau *time series*. Data yang digunakan dalam bentuk data sekunder yang diperoleh

¹Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: pendekatan kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 161 .

²Teguh Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 118.

dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan data Kota Sibolga atau www.djpk.go.id.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³ Menurut Suharsimi Arikunto populasi adalah “keseluruhan subjek penelitian”.⁴ Sedangkan yang dijadikan penulis sebagai objek populasinya adalah data realisasi Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Sibolga dari tahun 1994 sampai dengan 2013.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.⁵ Populasi dan Sampel merujuk pada sekumpulan objek yang memiliki kesamaan dalam suatu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok suatu penelitian. Sampel yang akan diteliti harus didefinisikan dengan jelas sebelum penelitian ini dilakukan.⁶ Adapun

³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 80.

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 173.

⁵ Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm. 81.

⁶Hendri Tanjung dan Abrista Dewi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), hlm. 56.

sampel pada penelitian ini adalah data Pajak Daerah selama 20 tahun dan data Pendapatan Asli Daerah selama 20 tahun.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan dengan menggunakan instrumen-instrumen yang diperlukan dalam penelitian.⁷ Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder.

1. Dokumentasi

Penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah metode mencari data tentang hal-hal atau variabel dengan catatan, transaksi, buku-buku, notulen, rapat, dan sebagainya.⁸ Data penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Sibolga dari tahun 1994-2013.

2. Studi Kepustakaan

Kajian pustaka berguna untuk mempertajam masalah dan mencari dukungan fakta, informasi atau teori dalam rangka menentukan landasan teori atau alasan bagi penelitiannya.⁹ Adapun studi kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari jurnal, skripsi, dan buku-buku yang terkait dengan penelitian.

⁷ Mardalis, *Metode Pendekatan Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm.73.

⁸ *Ibid*, hlm.131.

⁹ *Ibid*, hlm.34.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian.¹⁰ Penelitian yang dilakukan adalah penelitian sekunder dengan data dikumpulkan berdasarkan hasil realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Sibolga dari tahun 1994-2013.

Untuk menguji hipotesis, maka peneliti akan melakukan pengujian secara Kuantitatif dengan menghitung Pajak Daerah dan Pendapatan Asli daerah dengan alat bantu berupa program SPSS 22 (Statistical product and service solution). Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Analisa Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif (Descriptive) digunakan untuk menggambarkan tentang statistik data seperti min, max, mean, sum, standar deviasi, variance, range, dan lain-lain dan untuk mengukur distribusi data dengan skewness dan kurtosis.

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.¹¹

¹⁰Juliansyah Noor, *Op.Cit.*, hlm. 163.

¹¹Duwi Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 79. , *Op. Cit.*, hlm. 79. Duwi, *SPSS 22 Pengelohan Data Terpraktis* (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2014). hlm. 30.

2. Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah uji untuk mengetahui apakah variabel terikat, bebas atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Model regresi yang baik hendaknya berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui sebuah grafik.¹² Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas data, antara lain: dengan kertas peluang normal, uji chi-kuadrat, uji liliefors, dan teknik Kolmogorov- Smirnov, dan Shapiro-Wilk.¹³

Jika Signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak.

Jika Signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima.

3. Uji Linieritas

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui linieritas data, yaitu apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Uji ini digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi pearson atau regresi linear. Pengujian pada SPSS dengan menggunakan Test for Linearity pada taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila signifikansi (Linearity) kurang dari 0,05.¹⁴

Dalam penelitian ini penulis mengolah uji linieritas tersebut dalam bentuk Scatterplot dikarenakan peneliti ingin mengetahui hubungan antar pajak daerah dan pendapatan asli daerah dalam bentuk diagram.

¹²Umar husein, Metode Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Persada, 2013), hlm. 181 .

¹³Priyatno Duwi, *Op. Cit.*, hlm. 74.

¹⁴Priyatno Duwi, *Op. Cit.*, hlm. 79.

4. Analisis Regresi Sederhana

Regresi sederhana adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan dua variabel yaitu apakah naik atau turunnya variabel terikat dapat dilakukan melalui kenaikan atau penurunan keadaan variabel bebas.¹⁵ Analisis regresi sederhana digunakan untuk memprediksi besarnya variabel terikat dengan menggunakan data variabel bebas secara terpisah yang sudah diketahui besarnya.

5. Uji Hipotesa (*uji t*)

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05 (5%), dan untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak. Untuk Uji t, penelitian ini membandingkan antara t hitung dengan t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel independent secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen,

Dalam uji t ini dilakukan pada derajat kebebasan ($n-k-1$), di mana n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel. Untuk tingkat keyakinan yang digunakan adalah 95% atau $\alpha = 5\%$.

¹⁵Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm. 243.

6. Analisis Determinasi (R^2)

Analisis determinasi dalam regresi sederhana digunakan untuk mengetahui presentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Taraf signifikansi yang digunakan adalah $\alpha < 0,05$. R^2 diperoleh dengan mengkuadratkannya melalui program SPSS 22. Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat.¹⁶

¹⁶Mudrajad Kuncoro, *Op,Cit.*, hlm. 246.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Sibolga

1. Sejarah Kota Sibolga

Pantai Barat Sumatera, mempunyai kaitan panjang dalam lintasan sejarah. Sejak dulu daerah ini telah dikunjungi para pelaut yang datang dari dalam dan luar negeri dengan tujuan berdagang. Masyarakat pedalaman di dataran Sumatera bagian barat sangat butuh akan hasil laut dan garam yang diproduksi di sekitar pantai barat Sumatera, sebaliknya masyarakat pesisir pantai memerlukan hasil pertanian dan hasil hutan. Pada waktu itu orang-orang dari Batak Toba membeli garam dari penduduk yang mengolah garam di pulau Mursala, namun ada juga sebagian yang pergi ke pantai timur Sumatera.

Rute perjalanan dari Batak Toba ke pantai Barat antara lain: Silindung- Aek Raison- Bonan Dolok- Simaninggir- Mela Dolok- Mela-Pulau Mursala (Pulau di depan daratan Sibolga). Pengangkutan dilakukan oleh orang-orang yang memikul garam, lazim disebut Parlanja Sira (tukang Pikul Garam). Peristiwa ini berjalan lancar dalam waktu yang cukup lama. Sebelum Sibolga berdiri, pemukiman penduduk berada di sekitar Tapian Nauli, Pergadungan dan Poriaha sedangkan Wilayah Sibolga pada saat itu masih kosong/belum berpenghuni.

Tahun 1523 terjadi pertikaian antara orang Batak Timur dengan Aceh. Orang Batak meminta pertolongan kepada Portugis di Malaka, namun mereka tetap kalah. Menghadapi kekalahan dan untuk menghadapi terjadinya pertikaian baru, banyak orang-orang Batak melakukan perjalanan ke pantai Barat. Ini mengakibatkan rute perjalanan semakin ramai.

Melihat kondisi alam Teluk Nauli yang sangat strategis untuk berlabuh, didukung oleh keindahan alam dan laut yang tenang menjadikan hubungan antara masyarakat pesisir dan pedalaman tetap terjalin. Belanda yang juga melihat kelebihan daerah Teluk Sibolga, mulai singgah di Tapian Nauli pada tanggal 14 Desember 1601 dengan 2 buah kapal yang dipimpin oleh Gerard de Roij dan Laurens Deckter. Mereka membeli rempah-rempah dan hasil hutan Tapanuli Nauli yang saat itu telah mulai sebagai lintasan perdagangan. Juga diramaikan oleh para pedagang dari Eropa, Arab, India dan Cina.

Saat perdagangan semakin ramai, VOC, perusahaan dagang Belanda mulai ikut berperan serta dan berusaha keras merebut jalur perdagangan yang ada dengan cara penyediaan pengawalan perdagangan oleh kapal perang, persaingan pun tidak dapat dihindari. Belanda yang kontra dengan Inggris memicu pertikaian yang menjurus pada peperangan.

Pada saat itu Ompu Datu Hurinjom Hutagalung yang berasal dari Silindung membuat pemukiman di Simaninggir, sebuah kawasan dekat dengan Bonan Dolok, 10 Km sebelah utara Sibolga. Tempat tersebut berada dalam ketinggian yang dapat langsung memantau ke Teluk Tapian

Nauli, akhirnya daerah ini berfungsi sebagai persinggahan bagi orang yang melakukan perjalanan dari Silindung (Batak Toba) ke daerah pantai untuk melakukan perdagangan.

Perawakan Ompu Datu Hurinjom tinggi besar, dalam Bahasa Batak disebut BALGA. Para pedagang pribumi sering berkata “Beta singga tu inganan si BALGA-I ”, yang artinya hendak menuju pemukiman tempat OMPU DATU HURINJOM tinggal karena tabu bagi orang Batak menyebut nama orang yang disegani, nama julukan itu tetap disebut orang sampai kepada cucunya.

Nama pemukiman tersebut memakai gelar pendahuluannya: Huta ni Si Balga (kampong si Balga). Dalam pemakaiannya terjadi sedikit perbedaan ucapan karena faktor dialek bahasa.

- a. Si-Balga... Si Bolga... SIBOLGA...(Batak)
- b. Sibolga, dibaca SIBOGA...(Pesisir)
- c. SIBOUGAH...(Belanda dan Inggris)
- d. SIBARUGA...(Jepang, kerana dialek sulit mengucapkan R)

Pada zaman awal kemerdekaan Republik Indonesia Kota Sibolga menjadi ibukota Keresidenan Tapanuli di bawah pimpinan seorang Residen dan membawahi beberapa “Luka atau Bupati”. Pada zaman revolusi fisik Sibolga juga menjadi tempat kedudukan Gubernur Militer Wilayah Tapanuli dan Sumatera Timur Bagian Selatan, kemudian dengan dikeluarkannya surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 102 Tanggal 17 Mei 1946, Sibolga menjadi Daerah Otonom tingkat “D” yang

luas wilayahnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Residen Tapanuli Nomor: 999 tanggal 19 November 1946 yaitu Daerah Kota Sibolga yang sekarang. Sedang desa-desa sekitarnya yang sebelumnya masuk wilayah Sibolga On Omne Landen menjadi atau masuk Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Sibolga ditetapkan menjadi Daerah Swatantra Tingkat II dengan nama Kotapraja Sibolga yang dipimpin oleh seorang Walikota dan daerah wilayahnya sama dengan Surat Keputusan Residen Tapanuli Nomor: 999 tanggal 19 November 1946.

Selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor: 18 tahun 1956 Daerah Swatantra Tingkat II Kotapraja Sibolga diganti sebutannya menjadi Daerah Tingkat II Kota Sibolga yang pengaturannya selanjutnya ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Walikota sebagai Kepala Daerah. Kemudian hingga sekarang Sibolga merupakan Daerah Otonom Tingkat II yang dipimpin oleh Walikota Kepala Daerah.

Kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 1979 tentang pola dasar Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Sibolga ditetapkan Pusat Pembangunan Wilayah I Pantai Barat Sumatera Utara. Perkembangan terakhir yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Daerah Nomor: 4 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi Kantor Kecamatan, Sibolga dibagi menjadi 4 (empat)

Kecamatan, yaitu: Kecamatan Sibolga Utara, Kecamatan Sibolga Kota, Kecamatan Sibolga Selatan, dan Kecamatan Sibolga Sambas.

Kota Sibolga berdiri di atas daratan pantai, lereng, dan pegunungan, dimana hampir seluruh penduduknya bermukim di dataran pantai yang rendah. Terletak pada ketinggian berkisar antara 0 - 150 meter dari atas permukaan laut, dengan kemiringan lahan kawasan kota ini bervariasi antara 0-2 % sampai lebih dari 40 %.

Kota Sibolga terletak di Pantai Barat Provinsi Sumatera Utara yaitu di Teluk Tapian Nauli, \pm 350 Km selatan Kota Medan. Secara geografis wilayah Sibolga terletak antara $1^{\circ} 42' 1^{\circ} 46'$ Lintang Utara dan $98^{\circ} 44' - 98^{\circ} 48'$ Bujur Timur. Kota Sibolga secara administratif terdiri dari 4 Kecamatan dan 17 Kelurahan dan Luas 2.778 Ha atau 27,78 Km² dimana hanya berkisar 10,77 Km² yang layak huni. Dengan demikian, menurut luas lahan, Sibolga termasuk kota terkecil di Indonesia.

Iklim kota Sibolga termasuk cukup panas dengan suhu maksimum mencapai 32° C dan minimum 21.6° C. Sementara curah hujan di Sibolga cenderung tidak teratur di sepanjang tahunnya. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November dengan jumlah sekitar 798 mm, sedang hujan terbanyak terjadi pada Desember yakni 26 hari.

Pulau-pulau yang termasuk dalam kawasan otoritas Pemerintah Kota Sibolga adalah Poncan Gadang, Poncan Ketek, Pulau Sarudik dan pulau Panjang. Umumnya pulau-pulau ini bukan menjadi kawasan hunian penduduk. Adapun sungai-sungai yang mengalir di Kota Sibolga ialah Aek

Doras, Sihopo-hopo, Aek Muara Baiyon dan Aek Horsik, dengan tipe sungai kecil dan sangat dangkal.

Kecuali sebelah barat yang berbatasan dengan Samudera Hindia, seluruh wilayah daratan Kota Sibolga berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah. Itulah sebabnya secara sosial dan kebudayaan, Sibolga dan Tapanuli Tengah memang tidak terpisahkan bahkan secara tradisional sering kali dianggap sama saja.

2. Visi dan Misi Kota Sibolga

a. Visi

Secara umum pengertian Visi merupakan suatu gambaran bersama tentang masa depan atau merupakan pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan. Visi juga merupakan mental modal masa depan yang menjadi milik bersama dan diyakini dapat membuat perubahan menuju kesejahteraan bersama. Oleh karenanya Visi sebagai cara pandang atau cara melihat ke depan yang harus diemban agar tetap eksis dan inisiatif menuju masa depan yang diinginkan bersama.

Sejalan dengan pengertian Visi tersebut dengan memperhatikan berbagai permasalahan yang dihadapi maupun lingkungan strategis Kota Sibolga, maka Visi dalam membangun Kota Sibolga dalam 5 (lima) tahun kedepan tahun 2015-2020 adalah sebagai berikut:

“MEWUJUDKAN SIBOLGA YANG SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING”.

b. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai. Dengan adanya Misi diharapkan kepada seluruh pihak yang berkepentingan dapat mengenal serta mengetahui perannya, program-programnya dan hasil yang akan diperoleh pada masa yang akan datang.

Berdasarkan pengertian Misi tersebut maka Misi yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bersih (Clean Governance).
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan secara merata dan terjangkau bagi masyarakat.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
- 4) Mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki integritas, handal dan berdaya saing.
- 5) Pengembangan infrastruktur perkotaan dan fasilitas publik serta penataan kawasan perkotaan.

3. Ruang Lingkup Kota Sibolga

a. Pemerintahan

Kota Sibolga terdiri dari empat kecamatan :

- 1) Sibolga Utara (terdiri atas empat kelurahan)

- 2) Sibolga Kota (terdiri atas empat kelurahan)
- 3) Sibolga Selatan (terdiri atas empat kelurahan)
- 4) Sibolga Sambas (terdiri atas empat kelurahan)

b. Perekonomian

1) Pelabuhan Laut Sibolga

Kota Sibolga sudah sejak lama dikenal sebagai pintu gerbang kegiatan ekspor dan impor berbagai komoditas. Sejak dijadikan daerah otonom tahun 1956, Kota Sibolga mengandalkan Pelabuhan Laut Sibolga dan potensi perairannya sebagai sumber kehidupan penduduk. Namun akhir-akhir ini kegiatan bongkar muat barang di Pelabuhan Sibolga seakan tenggelam. Penyebabnya tak lain adalah fasilitas sandar kapal yang kurang memadai.

Mengingat bahwa pelabuhan laut Sibolga merupakan salah satu andalan maka hal yang perlu dilakukan adalah membangun fasilitas pelabuhan. Fasilitas penting untuk menampung kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan adalah gudang barang. Adanya gudang yang cukup di pelabuhan akan sangat menunjang kegiatan karena berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang yang akan dimuat atau setelah dibongkar. Penyimpanan barang di gudang yang rapi akan menjamin keamanan barang tersebut selain meningkatkan volume pengiriman maupun penerimaan barang.

Sejalan dengan kendala akan peningkatan fasilitas bongkar muat barang di pelabuhan Kota Sibolga, pada tahun 2016 lalu, Presiden RI Ir. Jokowi Widodo atas dasar pemaparan dari Wali Kota Sibolga Drs. Syarfi Hutauruk saat rapat bersama para kepala daerah dan tim pengendalian inflasi daerah di Jakarta, berkunjung ke Kota Sibolga dalam rangka *groundbreaking* pengembangan Pelabuhan Sambas Kota Sibolga, dan menargetkan pengembangan pelabuhan tersebut selesai pada tahun 2017 ini.

2) Sumber Daya Perikanan Laut

Komoditi andalan yang menjadi primadona di Kota Sibolga adalah produksi perikanan laut yang cukup berlimpah. Tepatnya produksi ikan yang di daratkan di wilayah ini. Nelayan umumnya menangkap ikan di perairan Teluk Tapian Nauli, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Nias, Aceh Selatan, bahkan sampai perairan Sumatera Barat dan Bengkulu. Penangkapan ikan merupakan penyumbang utama bagi kegiatan perekonomian Kota Sibolga.

3) Pariwisata

Letak Kota Sibolga yang sepi di tepi pantai merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki. Keindahan alam tepi pantai, dengan pesona deretan pulau-pulau yang ada menjadi daya tarik tersendiri untuk menarik wisatawan. Dengan keindahan alam tepi pantai ini, Kota Sibolga sangat berpotensi untuk mengembangkan paket wisata bahari. Pulau-pulau yang berpotensi mengembangkan

wisata bahari adalah Pulau Poncan Gadang, Pulau Poncan Ketek, Pulau Panjang dan Pulau Sarudik. Selain wisata bahari, keindahan alam Kota Sibolga juga cocok untuk dikembangkan menjadi wisata alam bagi yang menyukai petualangan. Lokasi wisata yang menjadi tujuan para wisatawan adalah Puncak Gunung Torsimarbarimbing, Puncak Gunung Santeong dan Puncak Pemancar TVRI.

Potensi wisata lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah wisata sejarah dan budaya. Kota Sibolga banyak meninggalkan catatan sejarah masa lampau yang penuh romantika perjuangan. Dan sejumlah peninggalan sejarah masa lalu, yang paling banyak adalah peninggalan masa penjajahan Jepang berupa benteng dan gua-gua buatan. Objek wisata peninggalan sejarah ini diantaranya adalah Gua Sikaje-Kaje, Gua Tangga Seratus, Benteng Sihopohopo, Benteng di Simaremare, Benteng di Bukit Ketapang dan Pulau Poncan Gadang yang menjadi basis tentara Jepang.¹

¹<http://www.SibolgaKota.go.id>

c. Topografi Kota Sibolga

Gambar 4.1
Lambang Kota Sibolga



Semboyan: *Sibolga Nauli*

Julukan: ("**Kota Berbilang Kaum**")

Gambar 4.2
PETA KOTA SIBOLGA



Gambar 4.3
KOTA SIBOLGA



B. Deskripsi Data Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan data Kota Sibolga atau www.djpk.go.id. Perolehan data yang diperoleh tersebut setelah diolah oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Data Realisasi Pajak Daerah

Berikut ini adalah hasil realisasi pajak daerah tahun 1994-2013:

Tabel 4.1
Realisasi Pajak Daerah
tahun 1994-2013 (disajikan dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Pajak Daerah
1994	228.866.430
1995	274.087.190
1996	304.294.933

1997	305.612.281
1998	1.495.698.600
1999	401.471.432
2000	340.080.000
2001	594.560.000
2002	973.500.000
2003	1.375.330.000
2004	4.212.050.000
2005	1.586.270.000
2006	1.298.680.000
2007	1.858.656.953
2008	2.184.216.023
2009	2.389.258.589
2010	2.662.000.000
2011	4.748.000.000
2012	1.183.000.000
2013	6.162.000.000

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa pajak daerah dari tahun 1994 sampai dengan tahun 1998 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, pada tahun 1999 dan 2000 pajak daerah mengalami penurunan yakni Rp 401.471.432 dan Rp340.080.000. kemudian mengalami kenaikan kembali yakni dari tahun 2001 (Rp594.560.000), 2002 (Rp973.500.000), 2003 (Rp1.375.330.000) dan 2004 (Rp4.212.050.000) kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2005 (1.586.270.000) dan 2006 (1.298.680.000), tahun 2007 sampai dengan 2011 pajak daerah mengalami kenaikan bertahap tapi ditahun 2012 pajak daerah kembali menurun dan kembali meningkat ditahun 2013 oleh karena itu pajak daerah Kota Sibolga mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun yang tidak seimbang.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berikut ini adalah hasil realisasi pendapatan asli daerah tahun 1994-2013:

Tabel 4.2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun 1994-2013 tahun 1994-2013 (Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1994	1.031.060.797
1995	1.134.260.710
1996	1.352.095.154
1997	1.388.039.395
1998	5.203.581.900
1999	1.329.176.251
2000	1.348.083.000
2001	2.463.310.000
2002	4.257.490.000
2003	7.162.160.000
2004	7.972.800.000
2005	5.467.170.000
2006	7.831.430.000
2007	9.412.177.948
2008	11.677.675.253
2009	12.820.153.408
2010	15.118.409.482
2011	21.663.389.950
2012	28.359.549.182
2013	29.458.000.000

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa pendapatan asli daerah dari tahun 1994 sampai dengan tahun 1998 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, pada tahun 1999 dan 2000 pendapatan asli daerah mengalami penurunan yakni Rp 1.329.176.251 dan Rp1.348.083.000. kemudian mengalami kenaikan kembali yakni dari

tahun 2001 (Rp2.463.310.000), 2002 (Rp4.257.490.000), 2003 (Rp7.162.160.000) dan 2004 (Rp7.972.800.000) kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2005 (5.467.170.000), tahun 2006 sampai dengan 2013 pendapatan asli daerah mengalami kenaikan bertahap dari tahun ketahun oleh karena itu pendapatan asli daerah Kota Sibolga mengalami fluktuasi..

C. Hasil Analisis Data

1. Analisa Statistik Deskriptif

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan data Kota Sibolga maka peneliti menggunakan 20 tahun data Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Berikut hasil statistik deskriptif data penelitian.

Tabel 4.3
Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajakdaerah	20	228866430	6162000000	1728881621.58	1640237138.105
PAD	20	1031060797	29458000000	8822500621.58	8794534583.344
Valid N (listwise)	20				

Berdasarkan Tabel 4.3 hasil statistik deskriptif di atas bahwa untuk variabel Pajak Daerah jumlah data (N) adalah 20, dengan minimum Rp.228.866.430, maximum Rp.6.162.000.000, rata-rata Rp.1.728.881.621,58 dan standar deviasi adalah Rp.1.640.237.138,105.

untuk variabel pendapatan asli daerahnya jumlah data (N) adalah 20, minimum Rp.1.031.060.797, maximum 29458000000, rata-rata Rp.8.822.500.621,58 dan standar deviasi adalah Rp.8.794.534.583,344. Dimana rata-rata (mean) merupakan ukuran pemusatan yang sangat sering digunakan, keuntungan dari menghitung rata-rata adalah angka tersebut dapat digunakan untuk gambaran atau wakil dari data yang di amati. Simpangan baku dinotasikan sebagai menunjukkan rata-rata penyimpangan data dari rata-ratanya.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas residual dengan metode *one sample kolmogrov-smirnov* Sebagai dasar pengambilan keputusannya, jika H_0 diterima $T_{tabel} < T_{hitung} (\alpha, n1, n2)_{0,05}$, maka kesimpulannya data berdistribusi normal. Jika H_0 ditolak $T_{tabel} > T_{hitung} (\alpha, n1, n2)_{0,05}$, maka tidak berdistribusi normal.

Tabel . 4.4
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Pajakdaerah	PAD
N		20	20
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	1728881621.58	8822500621.58
	Std. Deviation	1640237138.105	8794534583.344
Most Extreme Differences	Absolute	.185	.188
	Positive	.185	.188
	Negative	-.180	-.188
Test Statistic		.185	.188
Asymp. Sig. (2-tailed)		.072 ^c	.061 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

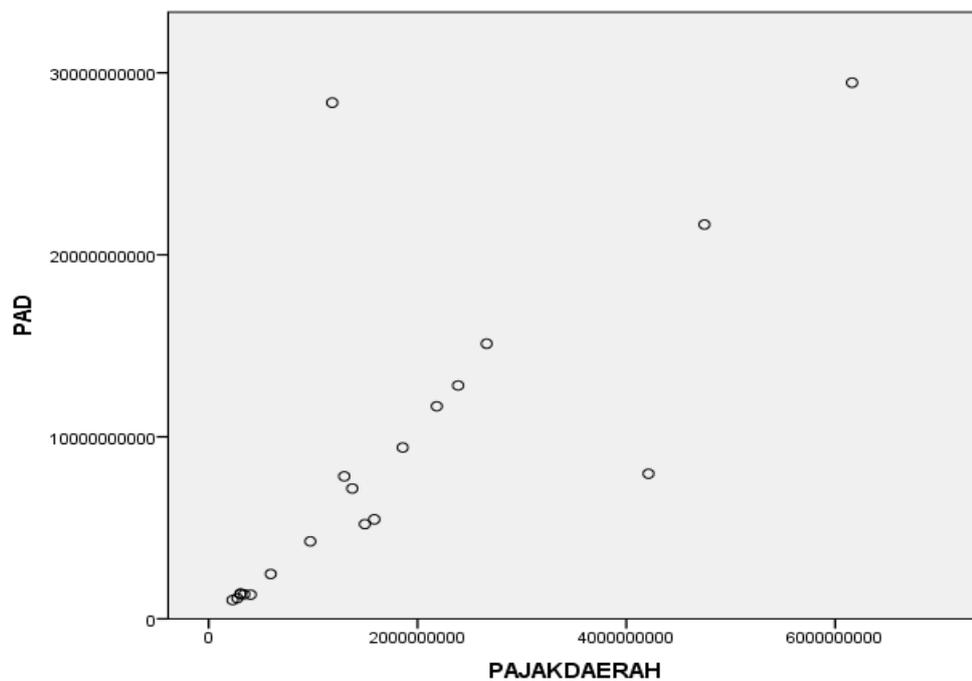
c. Lilliefors Significance Correction.

Dari hasil analisis di atas dapat dikatakan data berdistribusi normal karena pada uji normalitas dalam kolom kolmogorov-smirnov dapat dilihat nilai *test statistic* T_{hitung} Pajak daerah $0.185 > 0.05$ dan nilai *test statistic* T_{hitung} PAD $0.188 > 0,05$ yang menunjukkan lebih besar dari pada tabel kolmogrov-smirnov nilai T_{tabel} $0,05$ maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

3. Uji Linieritas

Berdasarkan hasil uji linieritas menggunakan Scatterplot yang dilakukan peneliti melalui program SPSS 22. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5
Uji Linieritas



Berdasarkan Tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa semakin banyaknya titik-tik nol mendekati garis tengah maka hasilnya akan semakin baik pula, artinya terdapat hubungan yang linier secara signifikan antara variabel pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Sibolga.

4. Analisis Regresi Sederhana

Regresi sederhana adalah salah satu alat yang digunakan dalam memprediksi permintaan di masa yang akan datang dengan berdasarkan masa lalu, atau untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas (independent) terhadap satu variabel terikat (dependent) adalah dengan menggunakan regresi linier.

Tabel 4.6
Uji Regresi Sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1896293902.704	1977846575.109		.959	.350
Pajakdaerah	4.006	.840	.747	4.770	.000

a. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas dapat dilihat pada kolom *Unstandardized Coefficients* pada kolom B, menyatakan untuk nilai

$$Y = a + b X + e$$

regresi $a = 1896293902,704$ dan $b = 4,006$, sehingga dapat dibuat persamaan regresi linier untuk ke dua variabel (pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah) seperti berikut:

$$\text{PAD} = 1896293902,704 + 4,006 (\text{pajak daerah}) + 0,840$$

Angka-angka ini dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar 1.896.293.902,704 yang artinya jika pajak daerah (X) nilainya adalah 0, maka PAD (Y) nilainya positif yaitu 1.896.293.902,704.
- b. Nilai koefisien regresi variabel pajak daerah (X) sebesar 4,006 apabila pajak daerah mengalami kenaikan 1 (persen), maka pendapatan asli daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 4,006 persen. Koefisien bernilai positif artinya terdapat hubungan positif antara pajak daerah dengan pendapatan asli daerah, semakin meningkat atau semakin besar pajak daerah yang dibayarkan maka semakin meningkat jumlah pendapatan asli daerah yang diperoleh pemerintah.

5. Uji Hipotesis (*uji t*)

Uji *t* digunakan untuk menguji besar atau kuatnya hubungan antara variabel bebas (X) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).

Tabel 4.8
Uji Hipotesa (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1896293902.704	1977846575.109		.959	.350
Pajakdaerah	4.006	.840	.747	4.770	.000

a. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Penentuan hipotesis berdasarkan nilai t maka H_0 ditolak dan H_a diterima karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4.770 > 1.73406$), (dilihat pada t_{tabel} N 18 dengan taraf signifikan 0,05). Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah di Kota Sibolga 1994-2013.
 - b. Berdasarkan nilai signifikan H_0 ditolak dan H_a diterima, karena nilai signifikan $0,00 < 0,05$. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak daerah dan pendapatan asli daerah di Kota Sibolga 1994-2013.
6. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Uji koefisien determinan (R^2) untuk mengukur besarnya proporsi atau persentase variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien berkisar antara nol sampai dengan satu, bila R^2 semakin besar mendekati 1 menunjukkan semakin kuatnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat dan bila R^2 semakin kecil mendekati 0 maka dapat dikatakan

semakin kecilnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat.

Berikut uji koefisien determinasi (R^2) penelitian.

Tabel 4.7.
Uji Koefisien Determinan (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.747 ^a	.558	.534	6005228659.434	1.529

a. Predictors: (Constant), Pajakdaerah

b. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan Tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Nilai korelasi sederhana (R) angka R didapat 0.747 artinya korelasi antara penerimaan pajak daerah dengan pendapatan asli daerah sebesar 0.747 atau 74,7 %. Hal ini berarti terjadi hubungan yang sangat kuat.
- b. Variasi variabel PAD dapat dijelaskan oleh variasi variabel pajak daerah sebesar 55,8% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Adapun penelitian ini berjudul Pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Sibolga dengan periode 1994 sampai dengan 2013. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah

untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah kabupaten/kota.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Penerimaan Pendapatan Daerah dalam bentuk uang yang masuk ke kas daerah. Dan di ambil dari pajak-pajak yang dipungut oleh daerah dan di akui sebagai Pendapatan Asli Daerah melalui hasil pembagian dari dana perimbangan pusat dan perimbangan daerah melalui hasil realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Apabila pajak daerah meningkat maka pendapatan asli daerah juga akan meningkat sehingga taraf pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah akan tercapai sesuai perencanaannya. Namun bila pajak daerah menurun maka realisasi penerimaan pendapatan asli daerah akan menurun sebab kurangnya dana hasil APBD yang diterima daerah dari pemerintah pusat dan berdampak tidak terlaksananya suatu pembangunan di daerah tersebut.

Setelah melalui berbagai analisis data melalui software SPSS, maka dapat dinyatakan bahwa persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang positif. Dilihat dari uji analisis deskriptif dapat dilihat penerimaan Pajak Daerah jumlah data (N) adalah 20, dengan minimum Rp.228.866.430, maximum Rp.6.162.000.000, rata-rata Rp.1.728.881.621,58, dan standar deviasi adalah Rp.1.640.237.138,105. sedangkan untuk variabel Pendapatan Asli Daerahnya jumlah data (N) adalah 20, minimum Rp.1.031.060.797, maximum Rp.29.458.000.000, rata-rata 8.822.500.621,58, dan standar deviasi adalah 8.794.534.583,344.

Hasil dari uji normalitas juga menunjukkan bahwa Pajak daerah $0.185 > 0.05$ dan nilai *test statistik* T_{hitung} PAD $0.188 > 0,05$ yang menunjukkan terdapatnya hubungan antar pajak daerah dan pendapatan asli daerah secara signifikan adan data berdistribusi normal. Sedangkan pada uji regresi linieritas dengan menggunakan uji Scratteplot maka dapat di lihat bahwa terdapatnya hubungan antara pajak daerah dan pendapat asli daerah.

Nilai konstanta sebesar 1896293902,704 yang artinya jika pajak daerah (X) nilainya adalah 0, maka PAD (Y) nilainya positif yaitu 1896293902,704. Penentuan hipotesis berdasarkan nilai uji t maka H_0 ditolak dan H_a diterima karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4.770 > 1.73406$), dan kemudian nilai korelasi sederhana (R) angka R didapat 0.747 artinya korelasi antara penerimaan pajak daerah dengan pendapatan asli daerah sebesar 0.747 atau 74,7 %. Hal ini berarti terjadi hubungan yang sangat kuat.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sejalan dengan peneliti yang pernah dilakukan oleh Julick Ferlis Difa dkk yang berjudul Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dikabupaten Halmahera bahwa Besarnya kontribusi pajak daerah terhadap pad rata-rata 162,01%. Dimana Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah mempunyai pengaruh kontribusi yang besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Halmahera Selatan. Dan itu sama dengan kuatnya pajak daerah dalam mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

E. Keterbatasan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah yang disusun sedemikian rupa agar hasil yang diperoleh sebaik mungkin. Namun dalam prosesnya, untuk mendapatkan hasil yang sempurna sangatlah sulit, sebab dalam pelaksanaan ini terdapat beberapa kesalahan.

Diantara keterbatasan yang dihadapi peneliti selama melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi ini, yaitu: keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti yang masih minim, keterbatasan waktu, tenaga, sulitnya mendapatkan data-data yang ingin dikelola, serta dana peneliti yang tidak mencukupi untuk penelitian lebih lanjut. Waktu demikian, peneliti berusaha sekuat tenaga agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna penelitian ini. Segala kerja keras dan bantuan semua pihak, skripsi ini dapat diselesaikan.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dapat diambil kesimpulan bahwa secara parsial ada pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli (PAD) Kota Sibolga.

Pada persamaan regresi sederhana nilai konstanta nilai konstanta sebesar 1896293902.704 yang artinya jika pajak daerah (X) nilainya adalah 0, maka PAD (Y) nilainya positif yaitu 1896293902.704. Nilai koefisien regresi variabel pajak daerah (X) sebesar 4.006 apabila pajak daerah mengalami kenaikan 1 (persen), maka pendapatan asli daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 4.006 persen. Koefisien bernilai positif artinya terdapat hubungan positif antara pajak daerah dengan pendapatan asli daerah, semakin meningkat atau semakin besar pajak daerah yang dibayarkan maka semakin meningkat jumlah pendapatan asli daerah yang diperoleh pemerintah.

Penentuan hipotesis berdasarkan nilai t maka H_0 ditolak dan H_a diterima karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4.770 > 1.73406$), (dilihat pada t_{tabel} N 18 dengan taraf signifikan 0,05). Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah di Kota Sibolga 1994-2013. Sedangkan R Square (R^2) atau kuadrat dari r, yaitu menunjukkan nilai koefisien determinasinya 0.558. Angka ini akan diubah ke dalam bentuk persen, yang artinya kontribusi

variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai R^2 0.558 artinya persentase pengaruh penerimaan pajak daerah dengan pendapatan asli daerah sebesar 55.8 %. sedangkan sisanya 44,2 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Berdasarkan hasil dari uji t dapat disimpulkan bahwa $T_{hitung} (4.770) > T_{tabel} (1.73406)$.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis, ada beberapa saran yang ingin di sampaikan yaitu:

1. Bagi Pemerintah Kota Sibolga

Bagi pemerintah Kota Sibolga diharapkan agar lebih memperhatikan bagaimana cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari tahun ketahun dengan pajak daerahnya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian yang masih banyak kekurangan. Penulis mengharapkan agar peneliti selanjutnya dapat meneliti faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan pendapatan Asli Daerah .

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islam* Jakarta : Rajawali Pers, 2012.
- Dwiarso Utomo, Yulita Setiawan. dkk, *Perpajakan* Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET; Semarang: UDINUS, 2011.
- Duwi Priyatno, *SPSS 22 Pengelohan Data Terpraktis* Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2014.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Guritno Mangkoesobroto, *Ekonomi Publik* Yogyakarta: BPFE, 1993.
- Henry Faizal Noor, *Ekonomi Publik* Padang: Akademia Permata, 2013.
- [Http://www.SibolgaKota.go.id](http://www.SibolgaKota.go.id).
- [Https://www.Sumut.bps.go.id](https://www.Sumut.bps.go.id).
- Hendri Tanjung dan abrista dewi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta:gramata publishing, 2013.
- Husein Umar, *Metode Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Indra Bastian, *Akutansi Sektor Publik: Suatu Pengantar* Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2006.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* Jakarta:Kencana, 2011.
- Josef Riwu Kaho, *Prosfek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- M.Suparmoko, *Ekonomi publik*, Yogyakarta: ANDI, 2002.
- Mardalis, *Metode Pendekatan Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi, 2011.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi* Jakarta: Erlangga, 2003 .

- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: pendekatan kuantitatif* Jakarta: Rajawali pers, 2008.
- Muindro Renyoeijoyo, *Akutansi Sektor Publik* Jakarta: Mitra Wacana Media, 2008.
- Nurul Huda , *Keuangan Publik Islam pendekatan teoritis dan sejarah* Jakarta: Kencana, 2012.
- Prastowo Yustinus, *Panduan Lengkap Pajak* Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011.
- Rahardja Prathama, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikroekonomi & Makroekonomi* Jakarta: Lemabaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas, 2008.
- Sugianto, *Pajak & Retribusi daerah (Pengelolaan Pemerintahan Daerah dalam aspek Keuangan,Pajak & Retribusi Daerah)*, Jakarta:Grasindo, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu Pendekatan Praktis* Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- A. Nama : NUR AZIZAH SITUMORANG
Nim : 13 230 0028
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Tempat/ Tanggal Lahir : Sibolga, 11 April 1993
Alamat : Jln. Bangau No.45 Kel. Aek Habil
Kec.Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Sumatera Utara.
- B. Nama Orang Tua
Ayah : JASMIR SITUMORANG
Ibu : Almh. NURNI TANJUNG
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln. Bangau No.45 Kel. Aek Habil
Kec.Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Sumatera Utara.
- C. Pendidikan
1. SD Negeri 081240 Tamat tahun 2005
 2. SMP Negeri 1 Sibolga Tamat tahun 2008
 3. SMA Negeri 2 Sibolga Tamat tahun 2011
 4. Tahun 2013 Melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telepon (22080) Faximile (0634) 24022

Nomor : B-95/In. 14/G.6a/PP.00.9/03/2017 Padangsidempuan, 22 Maret 2017

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Kesediaan
Menjadi Pembimbing Skripsi

Yth :

Bapak/ Ibu :

1. H.Aswadi Lubis, SE.,M.Si
2. Utari Evy Cahyani, SP.,MM

Di

Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut :

Nama : Nur Azizah Situmorang

Nim : 13 230 0028

Jurusan : Ekonomi Syariah / ES-1 IE

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Pertama : Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah (PAD) Kota Sibolga

Judul Perbaikan : Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sibolga.

Untuk itu diharapkan kepada Bapak/Ibu agar bersedia membimbing mahasiswa tersebut dan penulisan proposal dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas kesediaan dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Mengetahui:

Dekan,

Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Ketua Jurusan

Muhammad Isa, ST.,MM
NIP. 19800605 201101 1 003

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA / TIDAK BERSEDIA

PEMBIMBING I

H. Aswadi Lubis, SE.,M.Si
NIP. 19630107 199903 1 002

BERSEDIA / TIDAK BERSEDIA

PEMBIMBING II

Utari Evy Cahyani, SP.,MM
NIP 19870521 201503 2 004

Tabel Nilai Kritis Uji Kolmogorov-Smirnov

n	$\alpha= 0,20$	$\alpha= 0,10$	$\alpha= 0,05$	$\alpha= 0,02$	$\alpha= 0,01$
1	0,900	0,950	0,975	0,990	0,995
2	0,684	0,776	0,842	0,900	0,929
3	0,565	0,636	0,708	0,785	0,829
4	0,493	0,565	0,624	0,689	0,734
5	0,447	0,509	0,563	0,627	0,669
6	0,410	0,468	0,519	0,577	0,617
7	0,381	0,436	0,483	0,538	0,576
8	0,359	0,410	0,454	0,507	0,542
9	0,339	0,387	0,430	0,480	0,513
10	0,323	0,369	0,409	0,457	0,486
11	0,308	0,352	0,391	0,437	0,468
12	0,296	0,338	0,375	0,419	0,449
13	0,285	0,325	0,361	0,404	0,432
14	0,275	0,314	0,349	0,390	0,418
15	0,266	0,304	0,338	0,377	0,404
16	0,258	0,295	0,327	0,366	0,392
17	0,250	0,286	0,318	0,355	0,381
18	0,244	0,279	0,309	0,346	0,371
19	0,237	0,271	0,301	0,337	0,361
20	0,232	0,265	0,294	0,329	0,352
21	0,226	0,259	0,287	0,321	0,344
22	0,221	0,253	0,281	0,314	0,337
23	0,216	0,247	0,275	0,307	0,330
24	0,212	0,242	0,269	0,301	0,323
25	0,208	0,238	0,264	0,295	0,317
26	0,204	0,233	0,259	0,290	0,311
27	0,200	0,229	0,254	0,284	0,305
28	0,197	0,225	0,250	0,279	0,300
29	0,193	0,221	0,246	0,275	0,295
30	0,190	0,218	0,242	0,270	0,290
35	0,177	0,202	0,224	0,251	0,269
40	0,165	0,189	0,210	0,235	0,252
45	0,156	0,179	0,198	0,222	0,238
50	0,148	0,170	0,188	0,211	0,226
55	0,142	0,162	0,180	0,201	0,216
60	0,136	0,155	0,172	0,193	0,207
65	0,131	0,149	0,166	0,185	0,199
70	0,126	0,144	0,160	0,179	0,192
75	0,122	0,139	0,154	0,173	0,185

80	0,118	0,135	0,150	0,167	0,179
85	0,114	0,131	0,145	0,162	0,174
90	0,111	0,127	0,141	0,158	0,169
95	0,108	0,124	0,137	0,154	0,165
100	0,106	0,121	0,134	0,150	0,161

n	1,07/√n	1,22/√n	1,35/√n	1,52/√n	1,63/√n
200	0,076	0,086	0,096	0,107	0,115

LAMPIRAN 1

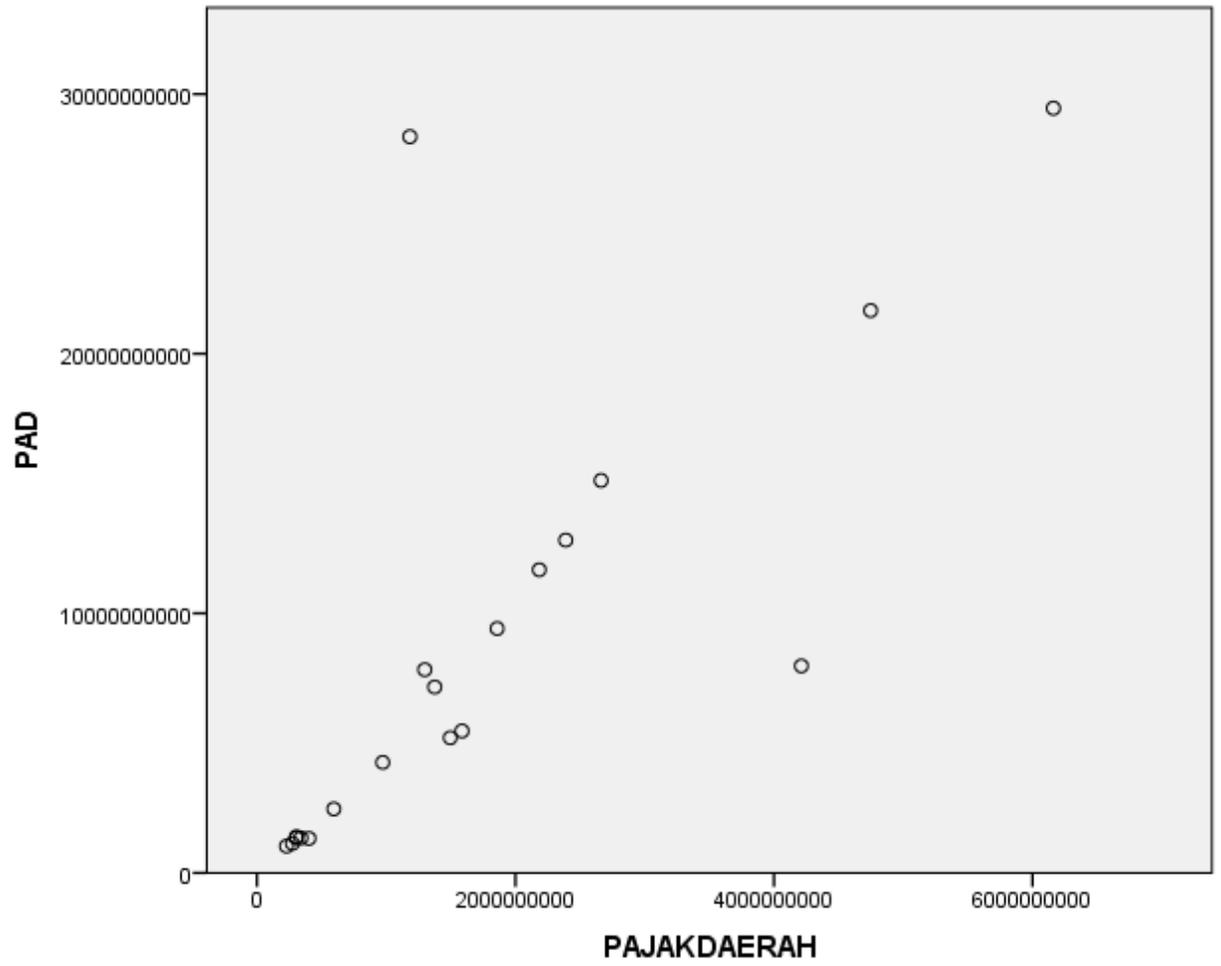
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAJAKDAER AH PAD	20	228866430	6162000000	1728881621. 55	1640237138. 103
	20	1031060797	29458000000	8822500621. 50	8794534583. 280
Valid N (listwise)	20				

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		PAJAKDAE RAH	PAD
N		20	20
Normal	Mean	1728881621.	8822500621.5
Parameters		55	0
^{a,b}	Std. Deviation	1640237138.	8794534583.2
		103	80
Most	Absolute	.185	.188
Extreme	Positive	.185	.188
Differences	Negative	-.180	-.188
	Test Statistic	.185	.188
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.072 ^c	.061 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.



LAMPIRAN 4

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.747 ^a	.558	.534	6005228659.370	1.529

a. Predictors: (Constant), PAJAKDAERAH

b. Dependent Variable: PAD

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1896293902. 769	1977846575. 070		.959	.350
	PAJAKDAER AH	4.006	.840	.747	4.770	.000

a. Dependent Variable: PAD

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1896293902. 769	1977846575. 070		.959 .350
	PAJAKDAER AH	4.006	.840	.747	4.770 .000

a. Dependent Variable: PAD